

ABSTRAK

Proses utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selamanya berjalan sesuai rencana, ada kemungkinan dalam prosesnya terjadi masalah, seperti tidak mampunya debitor membayar kembali utangnya kepada kreditor. Apabila terjadi demikian, maka untuk dapat mengambil kembali haknya kreditor, debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan. Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari pengurus yayasan yang melakukan utang piutang menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kasus utang piutang Yayasan Taman Harapan Malang dalam putusan nomor: 750/Pdt.G/2020/Pa.Mlg. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari pengurus yayasan yang melakukan utang piutang menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan pertimbangan Hakim terhadap kasus utang piutang Yayasan Taman Harapan Malang dalam putusan nomor: 750/Pdt.G/2020/Pa.Mlg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, data utama yang digunakan data skunder berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Hasil penelitian ini, suatu perjanjian utang piutang dapat menimpa kedua belah pihak yaitu Pembina yayasan dan PT. Bank Panin Syariah jika kedua belah pihak terbukti melanggar pasal 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Kata kunci : Utang piutang, Yayasan, Penyelesaian perkara

ABSTRACT

The process of accounts payable between creditors and debtors does not always go according to plan, it is possible that in the process there will be problems, such as the debtor's inability to repay his debt to creditors. If this happens, then to be able to take back the creditor's rights, the debtor must be declared bankrupt by the court. The problems raised in this study are how the legal consequences of the foundation's management who make debts according to law number 28 of 2004 concerning changes to law number 16 of 2001 concerning foundations and how judges consider the case of debts and receivables of the Taman Harapan Foundation Malang in decision number: 750/Pdt.G/2020/Pa.Mlg. The purpose of this study is to find out the legal consequences of the foundation's management who make debts and receivables according to law number 28 of 2004 concerning amendments to law number 16 of 2001 concerning foundations and the judge's consideration of the case of debts and debts of the Taman Harapan Malang Foundation in decision number : 750/Pdt.G/2020/Pa.Mlg. The research uses a normative juridical method, the main data used is secondary data in the form of data obtained based on literature studies and supporting data is Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. The results of this study, a debt agreement can befall both parties, namely the Trustees of the foundation and PT. Bank Panin Syariah if both parties are proven to have violated Article 28 of 2004 concerning amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations.

Keywords: *Accounts Payable, Foundation, Case Settlement*